

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA
SENAPAN ANGIN DI SAWAHLUNTO
(Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg)**

ARTIKEL



**OLEH
APRIONALDO
NPM : 1710012111050**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
TAHUN AJARAN 2020/2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 19/Pid-02/III-2021

Nama : Aprionaldo
NPM : 1710012111050
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pindana Korupsi Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa
Senapan Angin Di Sawahlunto (Studi Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Rianda Seprasias, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Yetisma Saini, S.H., M.H

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA SENAPAN
ANGIN DI SAWAHLUNTO (Studi Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg)**

Aprionaldo¹, Rianda Seprasiasia¹, S.H.,M.H.,

¹Legal Studies program, Faculty of Law, University of BungHatta

Email: aldoaprionaldo@gmail.com

ABSTRACT

The goods and services procurement sector is one of the prone points for corruption. The procurement of goods and services is an activity of the government in terms of procuring goods and services to meet the needs of the community in relation to its function as a public servant. The criminal acts of corruption that occurred in Decision Number 21 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN-Pdg, Defendant I HR and Defendant II JR were proven to have legally committed a criminal act of corruption in the Agriculture and Forestry Service of Sawahlunto City. Formulation of the problem: (1) What is the material criminal responsibility for the perpetrators of corruption in the procurement of air rifle goods and services in Sawahlunto in Decision Case Number 21 / Pid-Sus-TPK / 2018 / PN-Pdg? (2) What are the judges' considerations in imposing criminal offenses against the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services of air rifles in Decision Case Number 21 / Pid-Sus-TPK / 2018 / PN-Pdg? This type of research uses normative legal research. The data source used was secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used document studies and the data were analyzed qualitatively. The results showed (1) Defendant I HR and Defendant II JR were charged with Article 3 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime. (2) Judge's consideration, the decision which has been determined by the judge shall be considered first with juridical considerations in which the prosecutor has been able to legally prove the indictment and non-juridical considerations.

Keywords: Accountability, Corruption, Procurement of goods and services

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi pemerintah, sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan pertimbangan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau

dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan public

Beranjak dari permasalahan - permasalahan yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan korupsi barang dan jasa tersebut dan membuat karya tulis ilmiah dengan judul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PROYEK**

**PENGADAAN BARANG DAN JASA
SENAPAN ANGIN DI SAWAHLUNTO
(studi kasus putusan no
21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg).**

METODE

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Putusan Perkara Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

**HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN**

**Panggunjawaban pidana terhadap
pelaku korupsi pengadaan barang dan
jasa senapan angin di Sawahlunto pada
Perkara Putusan Nomor
21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg**

Dalam sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut undang-undang maupun yurisprudensi maka terdakwa tetap dipidana dengan ketentuan terhadap Terdakwa I HR dan Terdakwa II JR masing masing dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim cuma memutuskan pidana terhadap Terdakwa I HR dan Terdakwa II JR masing masing dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Yang dibahas dalam tujuan penghukuman itu tidak hanya bentuk pembalasan saja tapi bertujuan memberi efek jera dan pembinaan terhadap kedua terdakwa.

**Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana korupsi proyek pengadaan
barang dan jasa senapan angin pada
Perkara Putusan Nomor
21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg**

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap

¹ Bambang Sunggono, 2013.
Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm. 42.

dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis yaitu berdasarkan pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti, antara lain:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Dalam perkara ini adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi

Keadaan yang meringankan:

- a. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

PENUTUP SIMPULAN

- 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah kota sawahlunto dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi proyek pengadaan barang dan jasa senapan angin pada Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa

SARAN

1. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku korupsi ini, karena seseorang tidak akan berani melanggar peraturan apabila sanksinya ketat dan tegas.
2. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.